

BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA

Sebuah kajian dwi-bulanan tentang kebijakan subsidi energi Indonesia dan pasar energi

March 2017

As part of its work on energy policy and sustainable development in Indonesia, the Global Subsidies Initiative (GSI) of the International Institute for Sustainable Development (IISD) publishes a regular briefing on issues related to energy subsidies. For more information, contact Lucky Lontoh at lucky.lontoh@iisd.org and Phil Gass at pgass@iisd.org.

APBN 2017: Latar Belakang Reformasi Subsidi Energi Indonesia 2017

Sesuai dengan APBN 2017, pemerintahan Presiden Joko Widodo menyambut tahun fiskal yang baru¹ dengan sejumlah kebijakan terkait subsidi energi. Secara keseluruhan, alokasi anggaran untuk bahan bakar dan listrik menjadi lebih rendah dari sebelumnya, yang mencerminkan rencana pemerintah untuk menurunkan subsidi energi Indonesia.

Tabel 1 – Angka APBN dan Subsidi Energi

Indikator	2014 (LKPP)	2015 (LKPP)	2016 (Perubahan)	2017
INDIKATOR MAKROEKONOMI				
Inflasi (%)	8,36	3,35	4,00	4,00
Pertumbuhan (%)	5,06	4,79	5,20	5,10
Nilai Tukar (IDR/USD)	11.878,00	13.392,00	13.500,00	13.300,00
Suku Bunga BI (%)	5,8	5,97	5,5	5,3
Produksi Minyak Mentah (ribu/bl)	794,00	777,59	820,00	815,00
Produksi Gas Alam (mboepd)	1.224,00	1.195,40	1.150,00	1.150,00
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/bl)	97,00	49,20	40,00	45,00
PDB (Miliar rupiahIDR)	10.094.928,90	11.540.800,00	12.406.809,80*	-
RINGKASAN APBN				
Pendapatan Negara (Miliar rupiah)	1.550.490,80	1.508.020,40	1.786.200,00	1.750.300,00
State ExpenditureBelanja Negara	1.876.872,00	2.038.500,00	2.082.900,00	2.080.465,90
State Budget Surplus/DeficitSurplus/Defisit APBN	-241.494,00	-530.479,60	-296.700,00	-330.165,90
Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB	2,40	2,58	2,35**	2,41
INDIKATOR SUBSIDI ENERGI				
Subsidi Bahan Bakar Total (miliar rupiah)	239.994,06	60.758,70	43.686,90	32.300,00
(Subsidi bahan bakar termasuk bensin, diesel, minyak tanah, LPG dan LGV)	239.994,06	60.758,70	43.686,90	32.300,00
Bensin (nilai) (miliar rupiah)	108.957,69	11.194,56	0	0
Diesel (nilai) (miliar rupiah)	74.860,54	20.484,35	11.603	NA
Minyak tanah (nilai) (miliar rupiah)	7.200,49	3.207,52	2.304	NA
LPG (nilai) (miliar rupiah)	48.975,34	25.872,27	25.197	11.980,00
LGV (nilai)	NA	30.516,96	NA	NA
Total Subsidi Listrik (miliar rupiah)	101.816,32	58.332,38	50.668,20	45.000,00

* Angka PDB 2016 diperoleh dari Bank Indonesia.

**Angka dari APBN. Karena perbedaan sumber yang digunakan untuk memenuhi PDB 2016, persentase ini tidak berhubungan dengan jumlah PDB.

Sumber: Laporan APBN 2014, Laporan APBN 2015, APBN Perubahan 2016, APBN 2017.

¹ Tahun Fiskal Indonesia dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya. APBN untuk satu tahun ke depan disahkan oleh DPR pada akhir Oktober tahun sebelumnya.

Subsidi Harga Bahan Bakar: Subsidi Tersembunyi

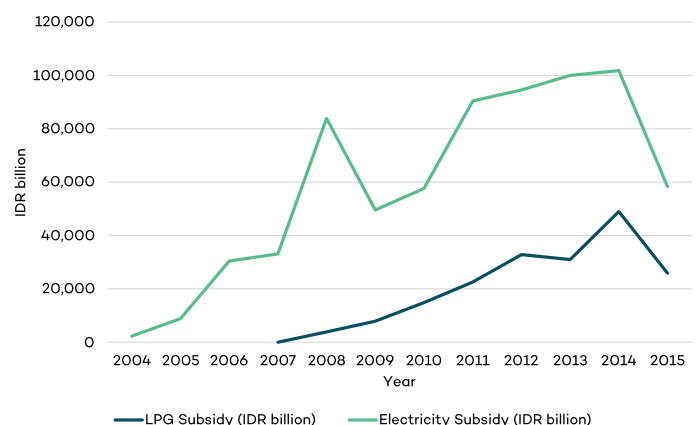
TPengurangan subsidi bahan bakar pada 2017 dipengaruhi oleh keputusan pemerintah untuk memotong separuh subsidi diesel dari Rp1.000 menjadi Rp500 per liter. Keputusan ini akhirnya diambil pada akhir Juni 2016 yang dinyatakan pada APBN Perubahan 2016 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016). Dampaknya adalah penurunan nilai subsidi dari Rp60.758 miliar pada 2015 menjadi Rp43.686 pada 2016 (lihat Tabel 1).

APBN Indonesia tidak lagi memberikan subsidi untuk bensin, meskipun pada kenyataannya subsidi masih diberikan dalam bentuk lain untuk bensin yang didistribusikan di luar Jawa- Madura-Bali (Jamali) dengan tujuan untuk menyamaratakan harga eceran di seluruh Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan bensin sejumlah tertentu dengan harga yang sudah ditetapkan, untuk didistribusikan oleh BUMN, PT Pertamina. Catatan dari BPH Migas menunjukkan bahwa pada 2014, konsumsi bensin bersubsidi di luar wilayah Jamali berjumlah 12,64 juta kiloliter atau 42 persen dari total konsumsi bensin bersubsidi Indonesia (BPH Migas, n.d.).

Sehubungan adanya perbedaan jarak dan infrastruktur distribusi di berbagai daerah di Indonesia, harga eceran bensin dapat berbeda di setiap wilayah. Setelah penghapusan subsidi bensin pada tahun 2015, awalnya pemerintah mencoba untuk mengatasi kesenjangan harga antar wilayah dengan mengusulkan subsidi distribusi di dalam APBN 2015. Pada November 2016, melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.36/2016, pemerintah memperkenalkan sebuah istilah baru, yaitu "jasa jasa penyaluran (margin fee) yang lebih tinggi," sebagai kompensasi bagi distributor di wilayah tertentu yang harga eceran (bensin) alaminya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku untuk wilayah Jamali. Menurut peraturan ini, biaya margin dibebankan kepada Badan Usaha Penerima Penugasan, dalam hal ini adalah PT Pertamina. Hal ini menjelaskan mengapa rekam jejak subsidi bensin tidak lagi dicatat dalam APBN sejak 2016 dan 2017. Kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan "BBM Satu Harga" di berbagai media nasional. Harga eceran bensin Indonesia secara resmi masih diatur oleh Kementerian ESDM melalui kebijakan penyesuaian harga yang berubah setiap tiga bulan sekali, meskipun sejak kebijakan tersebut diperkenalkan secara resmi, pemerintah tidak selalu mengubah harga sesuai dengan fluktuasi harga internasional yang menjadi acuan.

Subsidi Listrik: Perubahan besar pada 2017

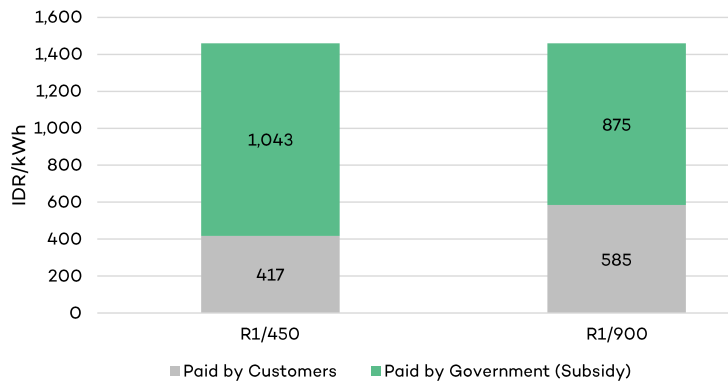
Salah satu kebijakan yang diputuskan dalam APBN 2017 pada akhir Oktober 2016 adalah perbaikan sasaran subsidi listrik dengan cara menyesuaikan daftar penerima subsidi listrik dengan basis data terpadu rumah tangga miskin (BDT). Kebijakan ini adalah respon dari kekhawatiran akan meningkatnya subsidi listrik yang puncaknya terjadi pada 2013-2014, seiring melonjaknya harga minyak internasional (TNP2K, 2016).



Gambar 1 – Subsidi Listrik dan LPG di Indonesia.

Sumber: Government of Indonesia (2005–2015, 2016a, 2016b, 2016c)

Kesepakatan dalam APBN 2017 kemudian diterjemahkan menjadi skema penyesuaian tarif listrik bertahap, serta dikeluarkannya 18,9 juta pelanggan listrik bersubsidi, yang berlaku sejak 1 Januari 2017. Menurut Kementerian ESDM, PT PLN memiliki 46 juta pelanggan yang menerima tarif listrik bersubsidi di dua kelas rumah tangga terendah, yaitu 450VA (23,1 juta pelanggan) dan 900VA (22,9 juta pelanggan) (Kementerian ESDM, 2017) (TNP2K, 2016). PT PLN memiliki total 61,17 juta pelanggan pada 2015, yang 56,7 juta di antaranya adalah kelas rumah tangga (PT PLN, 2016). Pada 2017, Indonesia akan fokus untuk merestrukturisasi subsidi untuk kelas 900VA, sambil tetap mempertahankan subsidi untuk kelas 450VA.



Gambar 2 – Struktur Tarif Bersubsidi PT PLN

Sumber: PT PLN (2016a)

Untuk mengidentifikasi penerima subsidi, PT PLN bekerja sama dengan TNP2K, sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengelola basis data kemiskinan Indonesia, yang telah mengidentifikasi 25 juta rumah tangga atau 92 juta individu yang tingkat sosial-ekonominya berada di 40% terbawah. Berdasarkan masukan dari TNP2K, dari Januari hingga Maret 2016, PT PLN meluncurkan sebuah survei lapangan untuk memverifikasi identitas 4.152.714 rumah tangga yang berdasarkan basis data rumah tangga miskin diasumsikan memiliki sambungan 900VA. Dari hasil verifikasi tersebut ditemukan bahwa 2,9 juta rumah tangga memiliki sambungan 900VA dan berhak atas subsidi dan 534.030 rumah tangga memiliki sambungan 450VA. Terdapat 196.521 rumah tangga yang tidak bisa diverifikasi, sementara sisanya tersebar pada kelompok yang tidak memiliki sambungan 450VA atau 900VA, atau masih belum memiliki sambungan listrik sama sekali (PT PLN, 2016a).

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri ESDM No.28/2016, PT PLN membagi pelanggan 900VA ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok dengan tarif subsidi, dan sebuah kelompok baru yang disebut sebagai Rumah Tangga Mampu (900VA/RTM) yang diharapkan membayar tarif non-subsidi. Beberapa bulan sebelum kebijakan ini diumumkan, untuk mendorong pelanggan PLN yang dianggap mampu agar secara sukarela berpindah ke kelas non-subsidi, sejak bulan Maret hingga Desember 2016 PT PLN menawarkan layanan gratis untuk pelanggan sambungan 900VA yang bermaksud meningkatkan (upgrade) sambungannya ke kelas non-subsidi 1.300VA (Detik, 2016).

Kelompok sasaran penyesuaian tarif listrik saat ini adalah pelanggan kelas 900VA/RTM (Tempo, 2017). Para pelanggan yang terdampak oleh kebijakan ini memiliki pengaturan alat ukur (meteran listrik) yang berbeda, sesuai penyesuaian tarif yang direncanakan akan diterapkan dalam tiga tahap pada 2017, yaitu pada bulan Januari (35 persen kenaikan dari bulan sebelumnya), Maret (38 persen kenaikan dari bulan sebelumnya), dan Mei (24 persen kenaikan dari bulan sebelumnya). Setelahnya, tarif tersebut diharapkan akan berfluktuasi mengikuti harga pasar (PT PLN, 2016).

Menurut analisis dampak awal yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan November 2016, kenaikan tarif listrik bertahap akan berkontribusi sebesar 0,35 persen terhadap inflasi bulanan setiap kali pemerintah menaikkan tarif, atau total sebesar 0,95 persen per tahun pada 2017 (Agung, 2016).

Namun dalam pelaksanaannya, penyesuaian tarif listrik sedikit mengalami penyesuaian sehubungan turunnya harga minyak mentah Indonesia yang merosot dari USD46,64 per barel pada Oktober 2016 menjadi USD43,25 per barel pada November (Detik, 2017). Harga minyak mentah Indonesia terus merosot ke angka USD39,9 per barel ada Januari 2017 (Katadata, 2017). PT PLN memutuskan untuk tidak mengikuti tren harga minyak ini dan mempertahankan tarif listrik untuk bulan Februari dan Maret 2017 (lihat Tabel 2).

Untuk mencegah *exclusion error*, atau terlewatkannya pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik dari daftar penerima, pemerintah menyiapkan sebuah mekanisme untuk menampung keluhan yang dikeluarkan dari daftar penerima subsidi dan ingin didaftarkan kembali sebagai penerima subsidi. Keluhan masyarakat tersebut pertama-tama akan diperiksa oleh TNP2K, yang kemudian akan merekomendasikan daftar pelanggan kepada PT PLN jika memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi. Keluhan masyarakat ini dapat disampaikan secara online dengan mengisi formulir di website <http://subsidi.djk.esdm.go.id/>. Warga yang tidak memiliki sambungan internet harus datang ke kantor desa, kecamatan atau kabupaten terdekat untuk meminta bantuan petugas pemerintah di sana untuk mendaftarkan keluhan mereka. Informasi dan keluhan juga dapat disampaikan melalui telepon ke +62 21 5224883 (LAPOR, 2017). Dari 2 Januari hingga 3 Februari 2017, Kementerian ESDM menyatakan telah menerima 249 permohonan online, yang 110 di antaranya memenuhi kriteria dan telah direkomendasikan kepada PT PLN untuk dijadikan penerima subsidi, sementara 139 kasus lainnya masih diverifikasi oleh TNP2K (TNP2K, 2017).

Table 2. Progress of electricity reform in Indonesia until March 2017

Kelas Tarif	Des-16	Jan-17	Feb-Mar 2017
	Tarif Penggunaan (Rp/KWh) dan KVArh (Rp/KVA)		
R-1/TR	1.472,72	1.467,28	1.467,28
R-1/TR	1.472,72	1.467,28	1.467,28
R-2/TR	1.472,72	1.467,28	1.467,28
R-3/TR	1.472,72	1.467,28	1.467,28
B-2/TR	1.472,72	1.467,28	1.467,28
B-3/TM Blok WBP	1.041,81	1.035,78	1.035,78
B-3/TM Blok LWBP	1.041,81	1.035,78	1.035,78
B-3/TM KVArh	1.121,23	1.114,74	1.114,74
I-3/TM Blok WBP	1.041,81	1.035,78	1.035,78
I-3/TM Blok LWBP	1.041,81	1.035,78	1.035,78
I-3/TM KVArh	1.121,23	1.114,74	1.114,74
I-4/TT Blok WBPBlok dan LWBP	1.003,66	996,74	996,74
I-4/TT KVArh	1.003,66	996,74	996,74
P-1/TR	1.472,72	1.467,28	1.467,28
P-2/TM Blok WBP	1.041,81	1.035,78	1.035,78
P-2/TM Blok LWBP	1.041,81	1.035,78	1.035,78
P-2/TM KVArh	1.121,23	1.114,74	1.114,74
P-3/TR	1.472,72	1.467,28	1.467,28
I/TR, TM TT	1.644,99	1.644,52	1.644,52

Catatan: Baris berwarna abu-abu adalah kelas sasaran dari skema reformasi subsidi

R-n: Residensial-[kelompok]
B-n: Bisnis-[kelompok]
I-n: Industri-[kelompok]

P-n: Publik-[kelompok]
kWh: kilowatt hour
kVA: kilovolt ampere

WBP: waktu beban puncak
LWBP: luar waktu beban puncak
TR: tegangan rendah

TM: tegangan menengah
TT: tegangan tinggi

Reformasi Subsidi LPG: Integrasi subsidi energi dengan sistem perlindungan sosial

APBN 2017 telah menyepakati pengurangan subsidi LPG pemerintah dari Rp31,98 triliun menjadi Rp11,98 triliun di versi APBN yang disetujui (Haryanto, 2017). Dua minggu setelah pengesahan APBN 2017, yaitu pada 15 November 2016, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas mengadakan pertemuan lintas kementerian untuk menerjemahkan kesepakatan anggaran tersebut menjadi kebijakan pelaksanaan. Kebijakan ini harus mematuhi dua panduan, yaitu pertama yang berasal dari parlemen yang bertujuan meningkatkan akurasi penyaluran dengan menggunakan basis data terpadu warga miskin, yang serupa dengan keputusan yang diambil untuk reformasi subsidi listrik. Panduan kedua adalah yang berasal dari presiden, yaitu untuk memanfaatkan sistem perbankan dalam menyalurkan bantuan sosial, dan dintegrasikan ke dalam sistem kartu perlindungan sosial (Kementerian BUMN, 2017).

Pertemuan lintas kementerian ini kemudian disusun dengan pertemuan teknis di sepanjang Desember

2016 yang bertujuan untuk memastikan pemerintah mengumumkan kebijakan reformasi subsidi LPG pada 1 Januari 2017.

Pada awalnya, rencana reformasi subsidi LPG akan dilakukan dengan sistem distribusi tertutup, dengan tujuan mengkonsentrasikan subsidi LPG hanya untuk masyarakat miskin, usaha kecil, nelayan serta petani kecil (Antara, 2017). Rencana tersebut akan memperkecil jumlah peserta program reformasi energi Indonesia dari 57 juta rumah tangga yang disasar melalui Program Konversi Minyak Tanah ke LPG, menjadi 26 juta rumah tangga miskin (berdasarkan basis data terpadu), 2,3 juta usaha kecil, dan nelayan dan petani kecil yang jumlahnya belum dapat dipastikan.

Analisis dampak inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa rencana sistem distribusi tertutup tersebut di atas dapat meningkatkan inflasi sebesar 0,75 persen secara nasional pada 2017, dan secara regional dapat meningkatkan inflasi sebesar 0,18 persen untuk wilayah Jawa dan 0,02 persen untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara . Jika

pemerintah memutuskan untuk melengkapi kebijakan tersebut dengan kenaikan harga LPG sebesar Rp1.000 per kilogram secara nasional, dampak inflasi total yang dibuat dari kombinasi kedua kebijakan tersebut akan menjadi 0,415 persen terhadap inflasi tahunan (Agung, 2016). Sebagai kesimpulan, Bank Indonesia memandang dampak inflasi dari kebijakan subsidi LPG, termasuk dampak yang diakibatkan jika kebijakan ini dikombinasikan dengan kebijakan reformasi subsidi lainnya, masih dapat diakomodasi oleh ekonomi Indonesia.

Pada 18 Januari 2017, Kantor Sekretariat Kabinet menyampaikan hasil pertemuan terbatas tentang integrasi program subsidi dan bantuan sosial dengan sistem kartu keluarga sejahtera terpadu, yang menginstruksikan agar seluruh kementerian terkait mengkalkulasi kembali rencana mereka (Sekretariat Kabinet, 2017). Hal ini menjadi pertanda bahwa peluncuran kebijakan reformasi LPG akan mengalami penundaan.

Meskipun rencana reformasi subsidi LPG Indonesia menerima instruksi serupa seperti kebijakan reformasi subsidi listrik, ada beberapa isu kunci yang membuat rencana ini lebih sulit dirancang, antara lain :

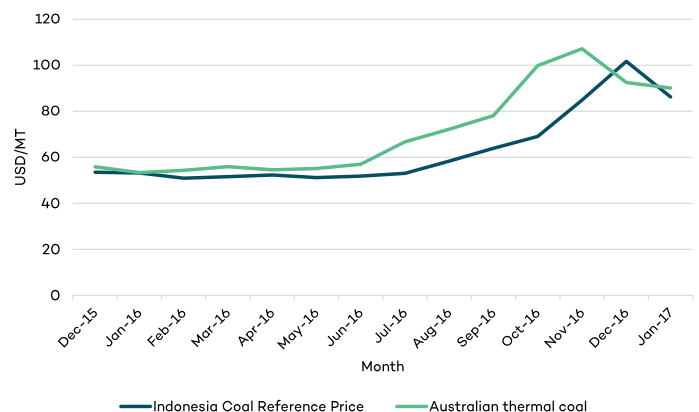
1. Waktu yang terbatas untuk melakukan analisis dan pengujian opsi kebijakan;
2. Kurangnya infrastruktur administrasi dan fisik untuk melaksanakan sistem perbankan skala nasional atau sistem kartu pintar;
3. Kelemahan basis data, khususnya data usaha kecil, nelayan dan petani kecil, serta masih banyak pelanggan LPG bersubsidi Indonesia yang masih belum terdaftar;
4. Penyebaran tidak merata antara lokasi titik distribusi LPG dengan tempat tinggal penerima subsidi sasaran;
5. Kebutuhan untuk mengkoordinasikan kebijakan ini dengan pimpinan pemerintah daerah, dan juga sinkronisasi kebijakan, keuangan, dan hukum dari tingkat pusat ke daerah;
6. Prosedur untuk mengintegrasikan subsidi energi dengan sistem bantuan sosial.

Kebijakan reformasi subsidi LPG masih diharapkan akan diluncurkan tahun ini sesuai dengan amanat APBN 2017. Namun, masih belum ada jadwal peluncuran yang jelas hingga saat ini, dengan kemungkinan terbesar pelaksanaannya pada bulan Maret atau April 2017 (Bisnis, 2017). Sehubungan dengan pesan yang dituangkan dalam instruksi tingkat tinggi yang mendasari perencanaan kebijakan ini, reformasi subsidi LPG Indonesia dapat dipahami juga

sebagai upaya untuk memadukan subsidi energi ke dalam sistem bantuan sosial.

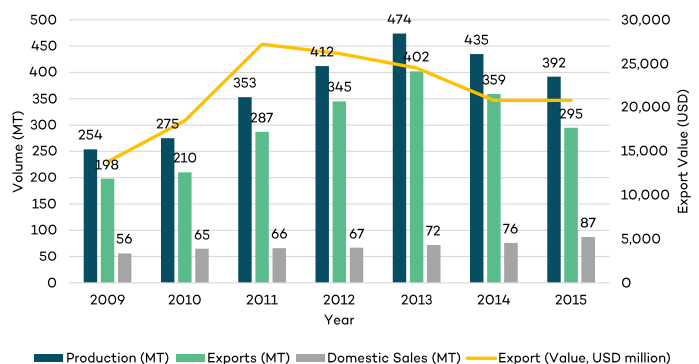
Sektor Batubara

Pada akhir 2016, ekspor batubara Indonesia kembali meningkat selama 13 bulan dengan harga batubara beranjak naik sejak Juli 2016 (Platts, 2017) (CNN Indonesia, 2016). Junda Agung, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, melihat kenaikan harga ini menguntungkan Indonesia, namun mempertanyakan keberlanjutan momentum tersebut (Republika, 2017). Produksi dan ekspor batubara Indonesia secara keseluruhan telah melambat selama tiga tahun terakhir sebagai dampak dari rendahnya harga dan kebijakan yang mewajibkan penambang batubara besar untuk memasok proyek pembangkit listrik nasional (Katadata, 2016). Produksi dan ekspor batubara juga terkena dampak dari kebijakan yang mewajibkan nilai tambah domestik (Merdeka, 2014) serta kebijakan pemerintah yang semakin memperketat izin usaha pertambangan sejak 2012 melalui sertifikasi clean and clear (C&C) (Merdeka, 2014) (CNN Indonesia, 2017).



Gambar 3 – Harga Batubara Indonesia

Sumber Directorate General of Mineral and Coal of the Ministry of Energy and Mineral Resources (2016, 2017); Indexmundi (n.d.)



Gambar 4 – Produksi, Ekspor, Penjualan Domestik, dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia

Source: APBI-ICMA (n.d.); BPS (n.d.)

Pada bulan September 2016, Kementerian ESDM merevisi Peraturan Menteri ESDM No.9/2016 yang menetapkan marjin keuntungan 15-25 persen untuk pasokan batubara ke proyek pembangkit listrik mulut tambang, menjadi negosiasi harga business-to-business murni antara produsen batubara dengan PT PLN yang saat ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.26/2016. Dari perspektif bisnis, revisi ini dipandang menguntungkan PT PLN (Katadata, 2016) selama masa harga batubara tinggi dan diharapkan menjamin pasokan batubara yang cukup untuk pembangkit listrik domestik.

Pada bulan Januari 2017, delegasi Global Subsidies Initiative (GSI) diundang oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempresentasikan laporan awal tentang dukungan dan subsidi batubara dan energi terbarukan di Indonesia. Presentasi tersebut memaparkan perkembangan dukungan pemerintah serta besaran subsidi secara keseluruhan terhadap sektor batubara Indonesia. Kajian serupa ini adalah untuk yang pertama kalinya dilakukan terhadap sektor batubara Indonesia. Selain Kemenko Ekonomi, dukungan terhadap proyek ini juga didapatkan dari Pemerintah Swedia dan Denmark. Selanjutnya, laporan akan ditinjau kembali hingga menampung pandangan seluruh pihak yang hadir pada acara bulan Januari tersebut, sebelum difinalisasi serta akan diluncurkan secara formal pada bulan April 2017.

Referensi

Agung, D. J. (2016). Dampak Inflasi Kebijakan Penyesuaian TTL 900VA untuk Rumah Tangga Mampu. *Coffee Morning Kementerian ESDM*. Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources.

Antara. (2017, January 13). Presiden minta penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran. Retrieved from <http://www.antaraneews.com/berita/606504/presiden-minta-penyaluran-energi-bersubsidi-tepat-sasaran>

APBI-ICMA. (n.d.). Indonesia coal productions, exports, domestic sales, and average of coal price based on ICPR/HBA periods: 2009–2015. Retrieved from <http://www.apbi-icma.org/global-chart/>

Bisnis. (2017, January 6). Pelaksanaan Distribusi Tertutup LPG Ditargetkan Maret. Retrieved from <http://industri.bisnis.com/read/20170106/44/617402/pelaksanaan-distribusi-tertutup-lpg-ditargetkan-maret>

BPH Migas. (n.d.). Data Kuota BBM BJT Tahun 2014. Retrieved from <http://www.bphmigas.go.id/kuota-bbm-jbt-per-provinsi#1474526658514-045b85e9-165d>

BPS. (n.d.). Ekspor Batu Bara Menurut Negara Tujuan Utama, 2002–2015. Retrieved from <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1034>

Cabinet Secretariat. (2017, January 18). *Arahan Presiden Pada Ratas Mengenai Integrasi Subsidi dan Bantuan Sosial (Bansos) dalam Satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)*. Jakarta, Indonesia.

CNN Indonesia. (2016, December 7). Menimbang Saham Tambang Saat Batu Bara Membara. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161207083411-92-177872/menimbang-saham-tambang-saat-batu-bara-membara/>

CNN Indonesia. (2017, January 5). Pencabutan IUP Tambang Non CnC Bikin Ruwet Produksi Batu Bara. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170105103857-85-184232/pencabutan-iup-tambang-non-cnc-bikin-ruwet-produksi-batu-bara/>

Detik. (2016, March 16). Pelanggan Listrik 900 VA Bisa Tambah Daya ke 1.300 VA Gratis. Retrieved from <http://finance.detik.com/energi/3166145/pelanggan-listrik-900-va-bisa-tambah-daya-ke-1300-va-gratis>

Detik. (2017, January 2). Tarif Listrik Januari 2017 Turun. Retrieved from <https://finance.detik.com/energi/d-3385771/tarif-listrik-januari-2017-turun>

Directorate General of Mineral and Coal of the Ministry of Energy and Mineral Resources. (2016). *Harga Batubara Acuan (HBA) & Harga Patokan Batubara (HPB) Bulan Desember 2016*.

Directorate General of Mineral and Coal of the Ministry of Energy and Mineral Resources. (2017). *Harga Batubara Acuan (HBA) & Harga Patokan Batubara (HPB) Bulan Januari 2017*.

Haryanto, J. T. (2017, September 22). Wajah Baru Subsidi Energi 2017. Retrieved from <http://koran.bisnis.com/read/20160922/251/586010/wajah-baru-subsidi-energi-2017>

Indexmundi. (n.d.). Coal, Australian thermal coal monthly Price - US dollars per metric ton. Retrieved from <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=coal-australian&months=60>

Government of Indonesia. (2005). *State Budget 2004 Audit Report*. Jakarta.

Government of Indonesia. (2006). *State Budget 2005 Audit Report*. Jakarta.

Government of Indonesia. (2007). *State Budget 2006 Audit Report*. Jakarta.

- Government of Indonesia. (2008). *State Budget 2007 Audit Report*. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2009). *State Budget 2008 Audit Report*. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2010). *State Budget 2009 Audit Report*. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2011). *State Budget 2010 Audit Report*. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2012). *State Budget 2011 Audit Report*. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2013). *State Budget 2012 Audit Report*. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2014). *State Budget 2013 Audit Report*. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2015). *State Budget 2014 Audit Report*. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2016a). *State Budget 2015 Audit Report*. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2016b). *Revised State Budget 2016*. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2016c). *State Budget 2017*. Jakarta.
- Katadata. (2016a, September 28). Pemerintah Revisi Aturan Harga Batu Bara PLTU Mulut Tambang. Retrieved from <http://katadata.co.id/berita/2016/09/28/pemerintah-merevisi-aturan-harga-batu-bara-pltu-mulut-tambang>
- Katadata. (2016b, October 16). Tiga Tahun Berurutan Volume Ekspor Batu Bara Indonesia Turun. Retrieved from <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/12/tiga-tahun-berurutan-volume-ekspor-batu-bara-indonesia-turun>
- Katadata. (2017, January 31). Harga Minyak Turun, Tarif Listrik Februari 2017 Tetap. Retrieved from <http://katadata.co.id/berita/2017/01/31/harga-minyak-turun-tarif-listrik-februari-2017-tetap>
- LAPOR. (2017, February 20). Permohonan Informasi Cara Mendapatkan Tarif Listrik Bersubsidi. Retrieved from <https://www.lapor.go.id/pengaduan/1714652/permohonan-informasi-cara-mendapatkan-tarif-listrik-bersubsidi.html>
- Merdeka. (2014a, January 3). ESDM sebut batu bara tidak terkena dampak pelarangan ekspor. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/esdm-sebut-batu-bara-tidak-terkena-dampak-pelarangan-ekspor.html>
- Merdeka. (2014b, October 1). ESDM: Tidak ada ET, perusahaan batu bara tak boleh ekspor. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/esdm-tidak-ada-et-perusahaan-batu-bara-tak-boleh-ekspor.html>
- Ministry of Energy and Mineral Resources. (2016, June 17). Subsidi Solar Disepakati Rp 500 per Liter. Retrieved from <http://migas.esdm.go.id/post/read/subsidi-solar-disepakati-rp-500-per-liter>
- Ministry of Energy and Mineral Resources. (2017, January 11). Masyarakat Tidak Mampu Tetap Dapat Subsidi Listrik. Retrieved from <http://esdm.go.id/index.php/post/view/Masyarakat-Tidak-Mampu-Tetap-Dapat-Subsidi-Listrik/>
- Ministry of State Owned Enterprises. (2017, January 16). Presiden minta penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran. Retrieved from <http://www.bumn.go.id/pertamina/berita/0-Presiden-minta-penyaluran-energi-bersubsidi-tepat-sasaran->
- Platts. (2017, February 14). Indonesia thermal coal exports hit 13-month high of 20.37 mil mt in Nov. Retrieved from <http://www.platts.com/latest-news/coal/london/indonesia-thermal-coal-exports-hit-13-month-high-26662525>
- PT PLN. (2016a, September 10). *Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Bagi Konsumen R-1/900 VA*. Retrieved from <http://www.djk.esdm.go.id/pdf/Coffee%20Morning/November%202016/3.%20Penerapan%20Subsidi%20Listrik%20Tepat%20Sasaran%20Bagi%20Konsumen%20R-1900%20VA.pdf>
- PT PLN. (2016b). *PLN Statistics 2015*. Indonesia: PT PLN.
- PT PLN. (2016c). *Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) Bulan Desember 2016*. Indonesia: PT PLN.
- PT PLN. (2016d). *Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) Bulan Januari 2017*. Indonesia: PT PLN.
- PT PLN. (2017). *Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) Bulan Februari dan Maret 2017*. Indonesia: PT PLN
- Republika. (2017, February 1). Batubara Naik, Ekonomi RI Diproyeksi Tetap Moncer. Retrieved from <http://ekbis.rmol.co/read/2017/02/01/278970/Batubara-Naik,-Ekonomi-RI-Diproyeksi-Tetap-Moncer->
- Tempo. (2017, January 2). PLN Mulai Naikkan Tarif Listrik Pelanggan 900 VA. Retrieved from <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/02/090831949/pln-mulai-naikkan-tarif-listrik-pelanggan-900-va>
- TNP2K. (2016, October 26). TNP2K Dukung Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Retrieved from <http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/tnp2k-dukung-pelaksanaan-kebijakan-subsidi-listrik-tepat-sasaran/>
- TNP2K. (2017, February 5). KESDM Terima 249 Laporan Warga Soal Pencabutan Subsidi Listrik. Retrieved from <https://finance.detik.com/energi/d-3414282/kesdm-terima-249-laporan-warga-soal-pencabutan-subsidi-listrik>

©2017 The International Institute for Sustainable Development
Published by the International Institute for Sustainable Development.

The International Institute for Sustainable Development (IISD) is one of the world's leading centres of research and innovation. The Institute provides practical solutions to the growing challenges and opportunities of integrating environmental and social priorities with economic development. We report on international negotiations and share knowledge gained through collaborative projects, resulting in more rigorous research, stronger global networks, and better engagement among researchers, citizens, businesses and policy-makers.

IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the International Development Research Centre (IDRC) and from the Province of Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations, the private sector, and individuals.

Global Subsidies Initiative (GSI)

GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI is headquartered in Geneva, Switzerland and works with partners located around the world. Its principal funders have included the governments of Denmark, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden and the United Kingdom.

IISD Head Office

111 Lombard Avenue, Suite 325
Winnipeg, Manitoba
Canada R3B 0T4

Tel: +1 (204) 958-7700

Website: www.iisd.org

Twitter: @IISD_news

GSI

International Environment House 2
9 chemin de Balxert, 1219 Châtelaine
Geneva, Switzerland

Tel: +41 22 917-8683

Website: www.iisd.org/gsi

Twitter: @globalsubsidies

